

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi politik merupakan suatu pembicaraan politik atau suatu bentuk penyampaian pesan politik baik verbal ataupun non verbal di mana dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik. Jika dipandang secara sederhana maka komunikasi politik merupakan suatu penyampaian pesan yang bernilai politik dari suatu sumber pada penerima untuk menciptakan suatu pemahaman makna bersama.

Menurut Bambang Setiawan, komunikasi politik adalah Proses penyampaian pendapat, sikap serta tingkah laku orang-orang lembaga atau kekuatan-kekuatan politik dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik, kemudian yang dimaksud adalah politik tidak lain adalah kehidupan bernegara.¹ Secara ringkas komunikasi politik adalah komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik, dengan demikian seluruh kegiatan yang berbau politik yang dilakukan oleh pemerintah atau kekuasaan negara beserta institusi pendukung maupun yang dilakukan dinamakan komunikasi politik.²

Menurut MC Nair, komunikasi politik adalah sebagai purposefull communication about politics, yang mencakup seluruh bentuk komunikasi yang dilakukan politisi dan aktor politik yang lain dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi yang mengarah pada aktor-aktor di luar politisi seperti konstituen dan columnis surat kabar, serta komunikasi mengenai aktor dan aktivitasnya

¹ Bambang Setiawan, komunikasi politik dan komunikasi politik nasional, Yogyakarta ; Aditya media, 1990 hal.67

² Nimo, D, Sanders handbook of political communication hal.58

seperti yang terdapat dalam laporan berita, editorial, serta diskusi lain mengenai politik di media.³ Aktivitas komunikasi politik ini terjadi dalam lingkup politik yang menurut Kaid, meliputi berbagai hal, diantaranya berkenaan dengan realitas objektif sebagai sebuah politik dengan membandingkan kejadian-kejadian politik yang sedang berlangsung realitas subjektif politik sebagaimana yang ditafsirkan oleh aktor serta masyarakat, dan konstruksi sosial realitas politik yang dilakukan oleh media.⁴

Seorang ilmuwan berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan suatu sarana pendekatan untuk membangun politik. Karena itu komunikasi politik dianggap memiliki sesuatu hal yang istimewa, komunikasi politik meletakkan basis untuk menganalisis masalah yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik dalam suatu bangsa. Komunikasi politik merupakan suatu penyebaran proses arti, makna atau pesan yang bersangkutan dengan suatu sistem politik.⁵

Terjadinya komunikasi politik tidak hanya berhubungan dengan partai politik tetapi berhubungan juga dengan lembaga pemerintah Legislatif dan Eksekutif. Sebagai sumber yang berperan dalam komunikator politik diantaranya, seperti presiden menteri, DPRD, MPR, KPU, gubernur, bupati, ataupun walikota, dan seluruh lembaga swadaya masyarakat serta kelompok yang mampu melakukan urusan politik dalam pemerintah.⁶

Salah satu lembaga legislatif adalah DPRD. DPRD merupakan singkatan dari dewan perwakilan rakyat daerah. Dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD adalah suatu lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya. Lewat lembaga DPRD inilah akan muncul suatu

³ Brian Mc Nair, Pengantar Komunikasi Politik, Nusamedia: Jakarta, 2016

⁴ Kaid, L.L, Sanders & Hirsch R, O, *Political Campaign Communication: A Bibliography and Guide To The Literature*. Metuchen, NJ: Screech Press. 1974

⁵ Ack Plano, Kamus Analisis Politik, Jakarta ; Rajawali, 1989, Hal 24

⁶ Sudianto, komunikasi politik, Jakarta; Rajawali press, 2006, hal 3

kebijakan yang menjadi dasar bagi lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, baik yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, pengawasan, ataupun anggaran.

Peran Lembaga Legislatif dan Eksekutif ini sangat diperlukan bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak jarang jika keduanya saling bersitegang atau salah satu dari mereka lebih mendominasi komunikasi dalam tataran positif. Hal ini sama dengan data yang peneliti temukan di kota Kediri. Dinamika politik yang terjadi di kota Kediri saat ini seolah-olah didominasi oleh seorang walikota Kota Kediri yaitu H.Abdullah Abu Bakar. Sosok walikota Kota Kediri ini sangatlah gencar dalam setiap pembicaraan pemberitaan, maupun dalam media sosial. Komunikasi politik pemerintah seolah-olah direduksi ke dalam bentuk komunikasi langsung yang ditujukan terhadap walikota Kediri, padahal keberadaan dari DPRD sebagai bagian dari lembaga politik juga harus menjalankan peranannya untuk melaksanakan komunikasi politik sehingga dapat menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan pemerintahan.

Tugas serta fungsi dari DPRD Kota Kediri adalah sebagai lembaga legislatif seolah-olah sudah redup dan tidak terlihat lepas dari pemberitaan, absen dari pengamatan dan perbincangan dari masyarakat. Padahal Fungsi dari lembaga legislatif ini sangatlah penting di kalangan masyarakat. Lembaga legislatif DPRD memiliki fungsi antara lain sebagai fungsi legislatif, hal ini berarti DPRD memiliki kewenangan untuk menyusun dan membuat undang-undang. Kemudian fungsi kedua adalah sebagai fungsi anggaran, hal ini dimaksudkan bahwa lembaga legislatif ini berhak untuk menetapkan anggaran belanja atau APBD. Kemudian ketiga berfungsi sebagai pengawasan, hal ini berarti lembaga ini dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang menjalankan undang-undang.

Peningkatan peran dan fungsi legislative anggota DPRD Kota Kediri tentu sangat dibutuhkan masyarakat guna untuk mendorong partisipasi masyarakat itu sendiri dalam politik serta untuk meningkatkan Citra positif dari lembaga tersebut. Tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti, Peneliti mendapatkan data bahwa lembaga legislatif ini sering dianggap masyarakat dengan Citra negatif seperti halnya sering melakukan praktek korupsi, tidak produktif dalam menghasilkan perda. Kemudian naiknya tunjangan anggota DPRD juga dipandang negatif oleh masyarakat, meskipun tujuannya untuk mencegah praktek korupsi.

Adanya citra negatif dimasyarakat mengenai DPRD ini maka sangat erat keitannya dengan aktivitas komunikasi politik yang terjadi. Citra DPRD di mata masyarakat saat ini masih cenderung negatif. Hal ini ditandai dengan banyaknya demo yang dilakukan masyarakat karena kurang puas dengan kinerja dari DPRD. Partisipasi masyarakat dalam bidang politik seringkali dirasa memiliki ruang yang sangat terbatas, Padahal di samping itu DPRD memiliki peranan yang sangat besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik dalam berbagai bentuk.

Menurut Moertopo tugas pokok dari legislatif yaitu DPR dan DPRD adalah untuk melakukan proses legislasi dalam menentukan pokok-pokok kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang di bidang APBD atau anggaran, legislatif menentukan anggaran belanja dan penerimaan negara atau daerah yang telah disepakati dengan pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan serta dalam hal pengawasan, lembaga legislatif ini berperan untuk memonitoring pemerintahan dengan berbagai alat serta kewenangan yang mereka miliki.⁷ Mengingat pentingnya peran dan fungsi dari terbentuknya DPRD ini maka terjadinya komunikasi politik antara anggota DPRD

⁷ Moertopo, A, *Strategi politik nasional*, Jakarta, 1974

dengan masyarakat tidak dapat di samping kan. Di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan peran dan mensukseskan tujuan dari DPRD dibentuk. Tidak terkecuali dengan komunikasi politik DPRD dalam meningkatkan fungsi legislatif di kota kediri.

Dikota kediri terdiri dari tiga wilayah kecamatan, yaitu kecamatan mojoroto, kecamatan kota, dan kecamatan pesantren. Kecamatan pesantren merupakan suatu kecamatan yang cukup luas wilayahnya, yaitu 23,9 km dimana terdiri dari 15 kelurahan. Peneliti tertarik meneliti topik ini karena komunikasi politik yang terjadi antara anggota DPRD dengan masyarakat cenderung bercitra negatif. Padahal komunikasi politik antara anggota DPRD dengan masyarakat harus berjalan dengan baik secara beriringan guna untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dinamika politik yang terjadi di kota Kediri belum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, di mana seharusnya lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif berjalan dengan beriringan. Ditandai dengan lebih mendominasinya lembaga eksekutif atau walikota Kota Kediri.

Selain itu sampai saat ini, dari sepengetahuan peneliti yang didasarkan pada pencairan peneliti dari literatur, baik dari google, yahoo serta perpustakaan IAIN Kediri masih belum ditemukan referensi skripsi mengenai Komunikasi Politik Anggota Dprd Dalam Meningkatkan Fungsi Legislatif Di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Seta masih sedikitnya penelitian mengenai komunikasi politik inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi tema dalam skripsi.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah peneliti paparkan, peneliti mencoba mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi dengan judul "**KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM MENINGKATKAN FUNGSI LEGISLATIF DI KECAMATAN PESANTREN, KOTA KEDIRI**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah peneliti paparkan, menghasilkan suatu rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana komunikasi politik anggota DPRD dalam meningkatkan fungsi legislatif di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri?
2. Bagaimana media komunikasi politik anggota DPRD yang digunakan untuk meningkatkan fungsi legislatif di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah

1. Untuk mengetahui komunikasi politik anggota DPRD dalam meningkatkan fungsi legislatif di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri
2. Untuk mengetahui media komunikasi politik anggota DPRD yang digunakan dalam meningkatkan peran legislatif di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai komunikasi politik yang digunakan anggota DPRD dalam meningkatkan fungsi legislatif di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri serta untuk memberikan gambaran mengenai media komunikasi politik yang digunakan anggota DPRD untuk meningkatkan peran legislatif di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
 - b. Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah Khasanah keilmuan ilmu komunikasi khususnya bagi komunikasi politik.

2. Manfaat praktis

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai dunia politik.

Selain itu diharapkan dari adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, peneliti menelusuri beberapa karya penelitian lain. Pembahasan mengenai penelitian terdahulu ini dilakukan sebagai referensi sumber acuan, serta sebagai perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan . adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, antara lain :

1. Jurnal Emilsyah Nur, 2019, strategi komunikasi tim sukses pada kampanye politik untuk memenangkan calon legislative kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan visi dan misi setiap calon legislatif peserta pemilu. Penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengalaman strategi komunikasi caleg dan tim sukses pada kampanye politiiik dalam memenangkan calon legislatif Makassar melalui strategi komunikasi yang dapat diterima oleh semua kalangan adalah kalangan komprehensif dangan pendekatan nilai-nlai lokal.strategi komunikasi caleg dan tim sukses dalam memenangkan calon legislatif Makassar terdiri dari tiga langkah penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, tema yang digunakan pun sama-sama berkaitan dibidang poltik. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah, jika penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada strategi untuk memenangkan calon legislatif, tetapi jika penelitian saat ini, lebih menekankan pada komunikasi politik untuk meningkatkan fungsi legislatif dikota Kediri.⁸

⁸ Emilsyah Nur, “*Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanya Politik Untuk Memenangkan Calon Legislative Kota Makassar*”, Jurnal Diskom, Vol. 02, No. 01, September 2019

2. Jurnal Djoni Gunanto, Lusi Andriyani, Muhammad Syahrul. 2020. Strategi komunikasi politik calon legislatif terpilih DPRD Tangerang Selatan dalam pemilu tahun 2019 (Fraksi Partai Solidaritas Indonesia). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi komunikasi politik calon legislatif terpilih DPRD Tangerang Selatan di tahun 2019 dan Fraksi PSI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik caleg PSI terpilih menggunakan push strategy yaitu mengkomunikasikan pesan anti intoleransi dan korupsi. Selain itu juga menggunakan strategi political branding dengan membuat tagline. MUDA, Religious, dan Professional. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, kemudian sama-sama membahas mengenai bidang politik. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah jika penelitian terdahulu lebih terfokus pada strategi yang digunakan calon legislatif agar terpilih dalam pemilu, tetapi jika penelitian saat ini lebih difokuskan pada komunikasi politik anggota DPRD untuk meningkatkan fungsi legislatif kota Kediri.⁹
3. Fadly Jamil. 2016. Strategi komunikasi politik Pilkada Gowa 2015 (Studi Kasus Kemenangan Adnan Purchita Ichsan Yasin Limpo S.H. dan H. Abd Rauf Mallanganni, S.Sos., M.Si). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penentuan strategi komunikasi politik kemenangan Adnan Purchita Ichsan Y.L., S.H dan H. Abdul Rauf Mallanganni, S.Sos., M.Si dipemilukada Kabupaten Gowa 2015, selain itu juga untuk mengetahui pola penerapan strategi komunikasi politik kemenangan Adnan Purchita Ichsan Y.L., S.H dan H. Abdul Rauf Mallanganni, S.Sos., M.Si

⁹ Djoni Gunanto, Lusi Andriyani, Muhammad Syahrul, "Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Terpilih DPRDd Tangerang Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019 (Fraksi Partai Solidaritas Indonesia)", *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, Vol. 04, No. 02, Desember 2020.

dipemilukada kabupaten gowa 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa walaupun terjadi gejolak sebelum dan pascaa pemilihan kepala daerah kabupaten gowa, adnan dan pasangannya dapat keluar sebagai pemenang, dengan menggunakan metode membangun komunikasi langsung dengan warga. Selain itu, dukungan keluarga, kekuatan modal beserta jaringan yang kuat dalam mengemas pesan-pesan politik secara lebih apik menjadi investasi politik tersendiri bagi pasangan adnan dan H. abd rauf dalam meraih kemenangannya. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode kualittatif, serta sama-sama membahas mengenai bidang politik. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah, jika penelitian terdahulu membahas mengenai strategi kemenangan pilkada gowa, tetapi pada penelitian saat ini lebih terfokus dalam membahas mengenai komunikasi politik yang digunakan anggota DPRD dalam meningkatkan fungsinya.¹⁰

F. Definisi Operasional

1. Komunikasi Politik

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, serta kebijakan pemerintah mengenai persoalan-persoalan politik. Komunikasi politik anggota DPRD dalam meningkatkan fungsinya ini merujuk pada teori dari Mc. Nair. Dimana Mc. Nair membagi komunikasi politik menjadi tiga bagian, yaitu pertama komunikasi politik adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan pelaku politik lain guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua komunikasi

¹⁰ Fadli Jamil, *Strategi Komunikasi Politik Pilkada gowa 2015 (Studi Kasus Kemenagna Adnan Purchita Ichsan Yasin Limpo S.H. Dan H. Abd Rauf Malaganni, S,Sos.,M,Si)*, Skirpsi Uin Allauddin Makassar, 2016.

politik adalah komunikasi yang ditujukan kepada para pelaku politik oleh kalangan non politisi semisal pemilih dan kolumnis surat kabar. Yang ketiga adalah komunikasi politik adalah suatu komunikasi mengenai para pelaku politik beserta kegiatan mereka. Seperti dimuat dalam berita, editorial, serta bentuk lain bahasan politik dimedia.¹¹

¹¹ Brian Mc Nair, Pengantar Komunikasi Politik, Nusamedia: Jakarta, 2016.Hal.04.